



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

BPK Akan Audit Pembangunan KTL

LEBONG, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terhadap pekerjaan sarana pendukung Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) yang sebelumnya telah diputus kontraknya oleh Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Pencanaan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Lebong.

Pemutusan kontrak pembangunan sarana KTL yang dananya sebesar Rp 1,1 miliar lebih, telah dilakukan Bidang Perhubungan kepada pihak kontraktor dalam hal ini Cv Najwa Konstruksi pada bulan Desember 2018 yang lalu. Dari hasil opname pekerjaan setelah dilakukan pemutusan kontrak, Bidang Perhubungan mendapati persentase pekerjaan sebesar 37,45 persen. Akan tetapi, meski pemutusan kontrak telah dilakukan, diketahui hingga bulan Februari 2019 yang lalu, pihak kontraktor

masih melakukan pekerjaan pembangunan sarana KTL, sehingga persentase pekerjaan telah lebih dari persentase yang sebelumnya didapat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR, Ferdinan Agustian ST melalui Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan, Ummi Haidar Rambe St MSi, mengatakan bahwa dari hasil persentase yang didapat untuk pembangunan sarana KTL yaitu 37,45 persen, telah disampaikan oleh pihaknya ke pihak BPK.

"Akan tetapi dalam waktu dekat, pihak BPK kembali akan melakukan audit terhadap laporan yang sebelumnya kita sampaikan," jelasnya, kemarin (11/04).

Hal ini dilakukan karena pihak rekanan yang sebelumnya terus melakukan pekerjaan meski pemutusan kontrak telah dilakukan. Kembali dilakukannya audit

merupakan salah satu agar pembayaran pekerjaan KTL yang sebelumnya tunda bayar bisa dilakukan.

"Jadi kita tunggu hasil audit dari BPK terlebih dahulu," sampainya.

Dimana pembayaran pekerjaan yang sebelumnya tunda bayar karena di tahun 2018 terjadi devisa anggaran. Akan tetapi di anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD0 tahun 2018, pihaknya telah menyiapkan untuk pembayaran pekerjaan sebesar Rp 500 juta. "Nanti akan kita bayarkan sesuai dengan persentase hasil pekerjaan yang dilakukan pihak rekanan dimana kita akan berpegang dengan hasil opname yang sebelumnya kita lakukan," tegasnya.

Selain itu, CV Najwa Konstruksi yang sebelumnya telah diputus kontrak, Setelah diumumkan Layanan Pengadaan Secara Ele-

tronik (LPSE) Kabupaten Lebong sebagai pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebong sebagai pihak rekanan atau kontraktor yang di Black List.

"Kita tinggal menunggu rekomendasi dari Inspektoral yang sebelumnya telah kita laporkan," ujarnya.

Kembali akan diumumkan sebagai pihak yang akan dimasukkan ke LPSE sebagai kontraktor yang di Black List, maka CV Najwa Konstruksi akan dua kali ditayangkan sebagai kontraktor yang di Black List. Dimana pada tanggal 09 April 2019, CV Najwa Konstruksi telah ditayangkan di LPSE karena diputus kontraknya oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR karena tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan air Uram yang menuju kantor camat Uram Jayadengan nilai kontrak sebesar Rp 1,89 miliar. (614)